

NILAI DAN AFILIASI PARTAI POLITIK

Moh. Abdul Hakim

Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Helly P. Soetjipto

Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada

E-mail hakimpsi@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pola relasi antara karakteristik nilai yang menjadi prioritas individu dengan pilihan partai politik dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan kerangka teori sepuluh struktur dan konten nilai dari Schwartz (1992) yang telah divalidasi dalam berbagai konteks budaya. Sebanyak 210 peserta pemilu tahun 2004 (laki-laki = 96; perempuan = 105) dengan rentang usia 17-30 tahun diminta untuk melengkapi skala yang diadaptasi dari Portrait Values Questionnaire (PVQ) yang dikembangkan oleh Schwartz dan self-report religiosity scale serta diminta untuk menuliskan pilihan partai politiknya pada Pemilu tahun 2004. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis diskriminan (discriminant analysis) untuk menguji hipotesis: (1) terdapat perbedaan karakteristik nilai antara kelompok pendukung partai dan (2) pendukung partai yang berbasis keagamaan lebih religius dibanding pendukung partai sekular. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai berperan saat individu memutuskan partai apa yang akan didukung. Sementara temuan lainnya menunjukkan bahwa para pendukung partai berbasis agama cenderung lebih religius dibandingkan pendukung partai berbasis kebangsaan. Diskusi mengenai hasil-hasil temuan penelitian tersebut akan dipaparkan secara lebih luas di dalam pembahasan.

Kata Kunci: Nilai, partisipasi politik, pemilu, partai, PVQ

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu politik, psikologi memiliki peran penting dalam studi-studi seputar perilaku politik individu dan kelompok. Teori-teori psikologi, khususnya psikologi sosial dipandang efektif guna menjelaskan dan memprediksi perilaku politik. Hal inilah yang melandasi kemunculan bidang psikologi politik. Beberapa pendekatan yang telah digunakan oleh para peneliti psikologi politik antara lain teori rasionalitas (Uhlaner, 1986; Simon, 1995; Gupta dan Singh, 1992; Knack dan Kropf, 1998; Ohtsubo dan Watanabe, 2003; Redlawsk, 2003; dan Acevendo dan Krueger, 2004), teori motivasional (Moskowitz dan Stroh, 1996), teori kepribadian (Wiegele dan Oots, 1990; Krampen, 2000) dan teori

sikap (Barnea dan Schwartz, 1998; Fife-Schaw dan Breakwell, 1990; Fieldman, 1990; Hurwitz, 1984; dan Simon, 1995)

Dalam kajian perilaku politik, partisipasi politik merupakan tema yang banyak menarik perhatian para peneliti. Tema ini tidak hanya mengkaji keterlibatan individu dalam pemilu melainkan juga pada individu yang secara sadar memilih untuk tidak terlibat sama sekali dalam pemilu. Partisipasi politik tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan kepartaian. Sebagaimana definisi Uhlaner (1986), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan politis, yaitu mempengaruhi pengambilan kebijakan publik. Individu dapat melakukan partisipasi politik melalui banyak cara. Kegiatan-kegiatan politik yang umum dilakukan di Indonesia antara lain; memilih partai dan kandidat dalam pemilu, membantu kampanye partai, menyumbangkan uang kepada partai atau kandidat, menghubungi pengurus partai atau kandidat untuk menyampaikan pendapat atau mengusulkan kegiatan, melakukan advokasi kebijakan melalui LSM, demonstrasi, melakukan protes, dan mengajak orang lain untuk melakukan berbagai hal tersebut.

Memilih partai merupakan bentuk partisipasi politik yang paling lazim dibandingkan aktivitas-aktivitas politis lainnya. Memilih dalam pemilu tidak mensyaratkan kemampuan-kemampuan khusus pada individu. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, sehat mental, dan tidak sedang dicabut hak politiknya di bawah hukum, berhak menyampaikan aspirasi dengan memilih partai, anggota legislatif, pimpinan daerah, dan presiden. Pemerintah juga wajib memberikan fasilitas semudah mungkin bagi warga negara untuk memilih partai dan kandidatnya di TPS-TPS. Disamping itu, pemerintah juga wajib menyelenggarakan pendidikan politik melalui berbagai cara guna meningkatkan kesadaran politis warga negara dalam pemilu.

Memilih partai adalah proses yang disadari. Sebelum memilih partai politik, individu menyadari berbagai keinginan yang baik atau yang menurutnya penting. Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber-sumber kepercayaannya, partai tertentu mampu mewujudkan keinginan individu melalui kebijakan publik. Situasi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Bapak Bejo yang bekerja sebagai buruh pabrik menginginkan peningkatan pendapatan dan status karyawan tetap. Berdasarkan informasi-informasi politik yang ia dapatkan baik dari media masa maupun orang kepercayaannya, partai politik tertentu memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum regional

(UMR) dan kontrak kerja permanent. Dalam situasi demikian, maka Bapak Bejo cenderung akan mendukung partai tersebut.

Hurwitz (1984) mengatakan bahwa keterikatan individu pada partai tertentu (sikap partisan) melibatkan aspek kognitif (keyakinan), afektif (evaluasi), perilaku, dan perangkat motivasi psikologis yang mendukung sikap partisan. Oleh karena itu, individu yang berafiliasi dengan suatu partai tentu memiliki keyakinan terhadap karakteristik partai itu, memiliki opini evaluatif tentang perasaannya terhadap partai, perilaku tertentu yang mengekspresikan sikap partisannya, dan keselarasan sikap partisan dengan sikap-sikap individu pada hal-hal lain.

Namun perilaku politik individu tetap tidak mudah untuk diprediksi. Individu tidak selalu mengekspresikan sikapnya dalam bentuk perilaku yang rasional (Hurwitz, 1984). Masalahnya terletak pada proses penerimaan informasi politik yang diterima oleh individu. Proses ini rawan mengalami distorsi kognitif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori-teori kognitif, informasi-informasi yang diterima oleh individu akan melalui proses seleksi cara penyebaran informasi (*selective exposure*), perhatian (*selective attention*), persepsi (*selective perception*), dan ingatan (*selective retention*) (Hurwitz, 1984). Di dalam psikologi sosial telah umum diketahui bahwa individu memiliki kecenderungan untuk menerima informasi-informasi yang menguatkan keyakinan awalnya (*self justification*) (Burkly dan Blanton, 2005). Sebenarnya keyakinan juga dibangun berdasarkan informasi yang diterima oleh individu. Namun informasi ini disampaikan melalui saluran yang dipercaya dan telah diverifikasi berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup individu. Keyakinan sangat sulit diubah kecuali dengan cara yang sangat mahal. Individu yang telah memiliki keyakinan politik terhadap partai tertentu secara spesifik, cenderung tidak berganti-ganti partai pilihan. Perubahan-perubahan dalam pilihan partai terjadi pada individu yang memiliki keyakinan politik yang lebih umum (tidak mengarah pada satu partai tertentu).

Partisipasi politik adalah instrument guna mencapai tujuan politik (Hurwitz, 1984). Individu menggunakan standar yang berbeda-beda untuk melakukan evaluasi politik sesuai dengan kecenderungan individual (Moskowitz dan Stroh, 1996). Bagaimanapun, pergantian pemerintahan dan perubahan-perubahan kebijakan publik adalah bentuk harapan yang didasari oleh keinginan untuk mewujudkan keinginan atau kepentingan individual (*personal agendas*). Misalnya, individu memilih partai politik atau kandidat berdasarkan kepentingan-kepentingan ekonomi dirinya (Freire dan Lobo, 2005; Young, dkk.,1987). Selanjutnya,

individu akan mengidentifikasi partai mana yang paling relevan dengan kepentingannya dan memilih partai berdasarkan tingkat relevansi ini. Jadi, landasan fundamental partisipasi politik adalah kepentingan atau tujuan hidup individual. Tujuan-tujuan hidup disebut sebagai nilai-nilai (*values*) (Schwartz, 1992; Rokeach, 1968 dalam Gari). Nilai adalah dorongan, tujuan yang bersifat trans situasional, yang berbeda-beda pada tingkat kepentingan, yang berfungsi sebagai penuntun bagi seseorang dalam menjalani hidupnya (Schwartz, 1992). Sementara Rokeach mendefinisikan nilai sebagai ide-ide abstrak baik positif maupun negative yang merepresentasikan keyakinan tentang suatu kondisi yang ideal dan tujuan-tujuan yang ideal (Rokeach, 1968 dalam Gari dkk., 2005).

Dengan kata lain, nilai adalah landasan motivasi yang menggerakkan individu untuk melakukan berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah partisipasi politik. Sekilas, teori nilai hampir sama dengan teori-teori motivasi terdahulu, misalnya hirarki kebutuhan Abraham Maslow. Namun terdapat perbedaan mendasar antara teori nilai dengan teori kebutuhan. Teori nilai dibangun dari hasil survey nilai-nilai di banyak negara dengan melibatkan ribuan responden (Schwartz, 1992; Rokeach, 1968). Oleh karena itu, secara empiris, teori nilai ini lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dinamika nilai terjadi berdasarkan prioritas antara nilai satu dengan nilai lainnya dimana hal ini akan berbeda antara tiap individu atau komunitas sehingga cenderung fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai setting budaya. Hal ini sangat berbeda dengan teori kebutuhan yang menuntut adanya dinamika nilai kebutuhan yang berurutan antar tiap tipe kebutuhan.

Nilai merupakan ide-ide abstrak (Rokeach, 1968). Terdapat banyak variasi perilaku untuk mewujudkannya, sebagai representasi perbedaan-perbedaan antar individu atau oleh individu yang sama pada waktu yang berbeda dan dengan kemampuan yang berbeda-beda (Simon, 1995). Variasi pilihan partai pada individu-individu yang memiliki karakteristik nilai yang sama bisa terjadi sebagai konsekuensi adanya distorsi kognitif terhadap informasi-informasi politik. Walaupun demikian, kelompok pendukung partai tertentu tetap memiliki kecenderungan nilai yang membedakannya dengan kelompok pendukung partai lainnya. Semakin spesifik karakteristik suatu partai maka karakteristik nilai pendukungnya pun akan semakin spesifik (Barnea dan Schwartz, 1998).

Berdasarkan karakteristiknya, partai-partai di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu partai kebangsaan atau sekular dan partai berbasis keagamaan. Partai-partai yang memiliki karakteristik sekular antara lain Partai Golkar, PDI

Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Buruh, dan sebagainya. Sementara partai-partai yang dikategorikan partai berbasis agama antara lain Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Beberapa partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki karakteristik yang tidak spesifik. Sebagai partai yang dibentuk oleh organisasi keagamaan (PAN oleh Muhammadiyah dan PKB oleh Nahdlotul Ulama), kedua partai ini jelas didukung oleh individu-individu yang relatif religius. Sebab, yang tertarik untuk bergabung ke dalam organisasi keagamaan semacam ini adalah individu-individu yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi (Gari, dkk., 2005). Namun, secara formal, PAN dan PKB menyatakan diri sebagai partai kebangsaan. Untuk kedua partai ini, peneliti tetap mengkategorikannya sebagai partai keagamaan.

Prioritas Nilai dan Dinamika Kelompok Pendukung Partai

Kelompok yang dimaksudkan di sini bukanlah entitas sosial yang terstruktur secara formal. Dalam penelitian ini, kelompok adalah individu-individu yang memiliki kesamaan atribut sosial tertentu dan bergerak dalam kesatuan yang dinamis. Atribut inilah yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Berkelompok merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari usaha individu untuk mencapai nilai yang ingin ia capai. Sebab, individu tidak dapat mencapai nilai individual hanya dengan usaha mandiri. Kelompok terbentuk oleh individu-individu yang memiliki kemiripan prioritas nilai hidup. Gari dkk. (2005) telah membuktikan secara meyakinkan bahwa keanggotaan pada kelompok politik atau kelompok agama berkaitan erat dengan system prioritas nilai individu. Dengan kata lain, kelompok terikat oleh kesamaan kepentingan.

Walaupun karakteristik kelompok terbentuk atas dasar karakteristik nilai individu, tapi pengaruh kelompok terhadap karakteristik individu juga tidak dapat diabaikan. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa konsep diri individu diperoleh dari keanggotaan kelompok sejalan dengan seberapa signifikan nilai psikososial dan emosi individu terikat dalam kelompok (Chrobot-Mason, dkk., 2007). Semakin individu terikat dalam kelompok maka semakin banyak nilai-nilai kelompok yang diinternalisasi oleh individu. Partai politik merupakan institusi sosial, selain institusi agama, yang sangat aktif melakukan internalisasi identitas kelompok pada pendukungnya. Berbagai program kaderisasi dan propaganda dirancang guna memperkuat keterikatan individu pada partai. Ikatan ini akan semakin

menguat sejalan dengan rentang waktu individu mendukung partai. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa partai-partai politik yang telah berkiprah lama dalam dunia politik Indonesia memiliki pendukung yang lebih loyal dibanding partai-partai baru. Namun demikian, pendukung partai-partai lama rawan mengalami penurunan kepercayaan politik dan mereka akan memilih alternative pada partai-partai baru (Bélanger dan Nadeu, 2005).

Di dalam kehidupan nyata, individu terikat oleh berbagai entitas sosial pada tiap bidang kehidupan. Kelompok pendukung partai dapat dipandang sebagai entitas politik dengan partai sebagai atribut yang menyamakan individu-individu di dalamnya. Di dalam bidang ekonomi, individu mungkin dapat memilih lebih dari satu entitas kelompok namun hal ini tidak mungkin terjadi pada bidang politik. Prosedur politik mengharuskan individu untuk memilih satu partai di antara berbagai partai politik yang ada. Di negara yang menganut sistem multi partai seperti di Indonesia, tidak menutup kemungkinan banyak partai yang relevan dengan kepentingan individu. Namun individu mau tidak mau harus memilih salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, cukup logis bila kemudian beberapa kelompok pendukung partai memiliki kemiripan karakteristik nilai.

Sebagaimana yang ditulis Schwartz (1992), konflik dan keselarasan nilai akan menimbulkan konsekuensi praktis, psikologis, dan sosiologis. Pada level individual, konflik antar nilai akan menimbulkan konflik batin. Sementara pada level kelompok, konflik nilai dapat menyebabkan ketegangan sosial yang mengarah pada konflik antar individu atau antar kelompok pendukung partai.

Kemiripan karakteristik antar kelompok partai ditandai banyaknya anggota kelompok partai A yang memiliki karakteristik kelompok partai B dan sebaliknya. Pada level mikro, keadaan demikian memudahkan mobilisasi keanggotaan individu dari satu kelompok partai ke kelompok partai lain. Pada level makro, kemiripan karakteristik memudahkan kebijakan koalisi oleh pengurus kedua partai ini. Sebab, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan pendukung masing-masing partai dapat direduksi.

Untuk mengungkap karakteristik nilai kelompok pendukung partai, penelitian ini menggunakan Potrait Values Survey (PVQ) yang disusun oleh Schwartz dkk (2001). PVQ dikembangkan berdasarkan skala nilai Schwartz sebelumnya, yaitu Schwartz Values Survey (SVS) (Schwartz, 1992). PVQ dinilai lebih konkret dibanding SVS, pernyataan-pernyataan pada item-itemnya tidak terlalu abstrak (Matthews, dkk., 2007). PVQ juga dinilai valid (Koivula dan Verkasalo, 2006; Matthews, dkk., 2007) dan sesuai untuk digunakan dalam

penelitian-penelitian yang melibatkan mahasiswa (Matthews, dkk., 2007). Sebagaimana SVS, PVQ disusun berdasarkan struktur 10 tipe nilai universal Schwartz.

Teori Konten dan Struktur Nilai Schwartz

Nilai adalah dorongan, tujuan yang bersifat trans situasional, yang berbeda-beda pada tingkat kepentingan, yang berfungsi sebagai pedoman-pedoman prinsip dalam hidup seseorang (Barnea dan Schwartz, 1998). Teori konten dan struktur nilai Schwartz terdiri atas 10 nilai motivasional yang disebut sebagai; *Power, Achievement, Hedonism, Stimulation, Self-Direction, Universalism, Benevolence, Tradition, Conformity, dan Security*. Delapan nilai motivasional di antaranya (*Power, Achievement, Hedonism, Stimulation, Self-Direction, Benevolence, Conformity, dan Security*) merepresentasikan tiga kebutuhan universal eksistensi manusia, yaitu kebutuhan sebagai organisme biologis, kebutuhan koordinasi dalam interaksi social, dan kebutuhan berkelompok untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kemudian, berdasarkan studi empirisnya, Schwartz menambahkan dua nilai lainnya (*Universalism dan Tradition*) (Schwartz, 1992). Kesepuluh nilai ini telah diverifikasi di 47 negara. Penjelasan singkat mengenai 10 nilai ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Pengertian 10 Nilai Motivasional Schwartz (Barnea dan Schwartz, 1998)

POWER:	Status sosial dan kehormatan, kontrol dan dominasi atas orang lain dan sumber daya (kekuatan sosial, otoritas)
ACHIEVEMENT	Sukses pribadi dengan menunjukkan kompetensi berdasarkan standar sosial (kesuksesan, kesejahteraan, ambisi)
HEDONISM	Kesenangan atau kenikmatan ragawi (kesenangan, menikmati hidup)
STIMULATION	Kegembiraan, kesenangan, dan tantangan dalam hidup (keberanian, hidup yang bervariasi, kehidupan yang penuh kegembiraan)
SELF-DIRECTION	Cara berpikir dan bertindak dalam memilih, menciptakan, dan menyelidiki secara independent (kreatifitas, kebebasan, keandirian, kemampuan, kebijaksanaan, dan dunia keindahan)
UNIVERSALISM	Pemahaman, apresiasi, toleransi, dan perlindungan kesejahteraan untuk semua orang dan alam (kejujuran, pikiran yang luas, pelestarian lingkungan, makna hidup)
BENEVOLENCE	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan orang-orang yang sering menjalin hubungan personal (bantuan, memaafkan, dan keadilan social)

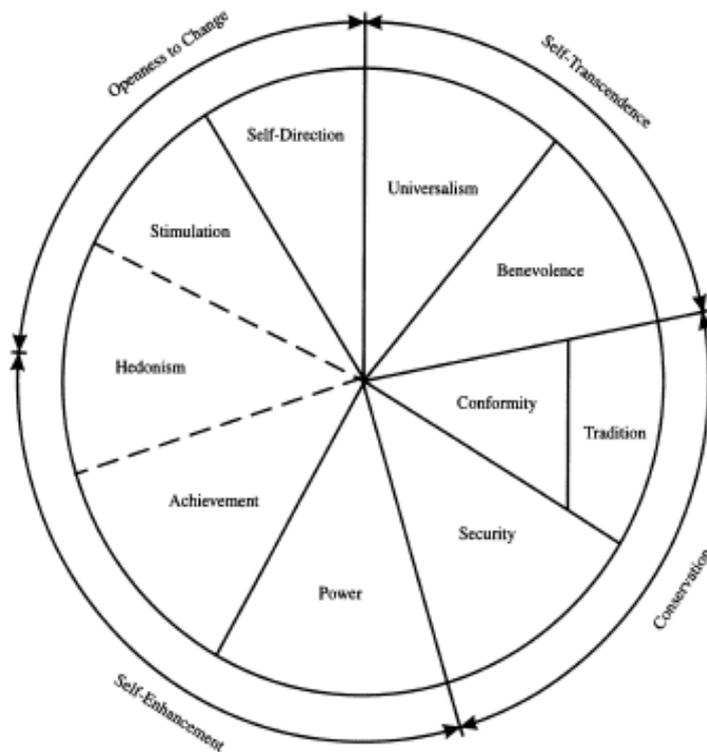
TRADITION	Respek, komitmen, dan menerima adat dan ide-ide yang ditawarkan oleh agama dan budaya (kesalehan, penghormatan kepada tradisi, kerendahan hati, kehidupan spiritual)
CONFORMITY	Pengendalian perilaku, kecenderungan, dan keinginan yang dapat membahayakan dan mengganggu orang lain dan merusak norma-norma atau kepentingan social (disiplin diri, kesopanan, penghormatan kepada kedua orang tua dan orang-orang tua, kepatuhan)
SECURITY	Keamanan, harmoni, dan stabilitas masyarakat, hubungan antar warga, dan diri (keamanan keluarga, keamanan nasional, dan tata tertib sosial)

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai satu tipe nilai menimbulkan konsekuensi psikologis, sosiologis, dan praktis yang dapat selaras atau saling berbenturan dengan pencapaian nilai lainnya (Barnea dan Schwartz, 1998). Sebagai contoh, pencapaian nilai *achievement* dapat menimbulkan konflik dengan pencapaian nilai *benevolence*. Memperjuangkan kesuksesan untuk diri sendiri akan menghalang usaha mendapatkan kesejahteraan bagi orang lain. Di sisi lain, pencapaian nilai *achievement* dapat selaras dengan pencapaian nilai *power*. Usaha mencapai kesuksesan pribadi akan memperkuat dan akan diperkuat oleh usaha untuk meningkatkan posisi sosial pribadi dan otoritas atas orang lain.

Relasi keselarasan dan konflik antar prioritas nilai membentuk struktur sistem nilai, direpresentasikan dalam Gambar 1. Dari struktur nilai di atas dapat diketahui bahwa beberapa tipe nilai dapat digabungkan ke dalam empat kategori yang lebih luas, yaitu dorongan yang berorientasi pada peningkatan diri (*self-enhancement*), keinginan untuk mencapai stabilitas dan harmonitas sosial dan mempertahankan *status quo* (*conservation*), kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, keinginan untuk mendapatkan makna hidup, spiritualitas, dan kesatuan dengan alam semesta (*self-transcendence*), dan kemampuan seseorang untuk merasa nyaman di dalam ketidakpastian dan dorongan untuk mengikuti kecenderungan intelektual dan emosionalnya (*openness to change*) (Schwartz, 1992).

Selanjutnya Schwartz (1992) menyebutkan bahwa dalam level masyarakat, pencapaian tipe-tipe nilai menimbulkan keselarasan dan konflik. Dimensi konflik dan keselarasan nilai muncul disebabkan tiga masalah mendasar dalam hubungan antara individu dan masyarakat (Dekker dan Fischer, 2008). Masalah pertama, bagaimana memandang hubungan antara individu dan kelompok. Seseorang dapat dipandang sebagai individu yang otonom atau individu yang melekat pada kelompok. Pada masyarakat dengan nilai yang

mengikat, individu secara intens terhubung dengan kumpulan yang lebih besar, dan kebermaknaan hidupnya terutama ditentukan oleh hubungan sosial. Dalam konteks demikian, individu dituntut oleh lingkungan sosial untuk menjaga dan menerima *status quo*. Di sisi lain, seseorang diharapkan menemukan makna hidupnya di dalam keunikan dirinya sebagai individu dan didorong untuk mengekspresikan kecenderungan, sikap, dan perasaan pribadinya. Individu bebas memaksimalkan potensi intelektual atau mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi tanpa campur tangan orang lain.



ivasional

Masalah kedua yang dihadapi oleh semua masyarakat adalah bagaimana seseorang mengelola hubungannya dengan lingkungan sosial dan alam. Pada satu sisi, individu terdorong untuk memiliki dan mendominasi lingkungan sosial dan alam. Sementara di sisi lain, individu berusaha untuk menerima dan menjaga harmonitas dunia. Pada dimensi pertama, individu terdorong untuk mengubah, mengatur, dan mengeksploitasi dunia sementara pada dimensi kedua, individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dunia, memahami dan menghargainya. Masalah ketiga adalah bagaimana mendorong perilaku yang bertanggung jawab untuk melestarikan struktur sosial. Individu harus didorong untuk mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, mengkoordinasikan perilaku dengan mereka, dan mengatur hubungan saling bergantung yang tidak dapat dihindari. Dimensi yang mencerminkan problem ini adalah masalah yang disebut *hierarchy versus egalitarianism*.

Apakah individu dituntut tunduk pada sistem hirarki ataukah dipandang secara moral pada kedudukan yang setara. Kemudian, berdasarkan ketiga problem tersebut, Schwartz (1992) merumuskan teori dinamika keselarasan dan konflik antar tipe nilai.

1. Keselarasan

Dalam mewujudkan nilai, terdapat dorongan simultan yang selaras dari sembilan pasang tipe nilai berikut; (a) *power* dan *achievement*, keduanya menitik beratkan pada superioritas dan penghargaan sosial; (b) *achievement* dan *hedonism*, keduanya mementingkan kesenangan pribadi; (c) *hedonism* dan *stimulation*, keduanya memberikan dorongan untuk membangkitkan kenikmatan secara efektif; (d) *stimulation* dan *self-direction*, keduanya melibatkan motivasi intrinsik untuk penguasaan dan keterbukaan terhadap perubahan; (e) *self-direction* dan *universalism*, keduanya mengekspresikan kepercayaan terhadap keputusan sendiri dan merasa nyaman dengan keanekaragaman; (f) *universalism* dan *benevolence*, keduanya mementingkan peningkatan hidup orang lain dan ketertarikan diri terhadap hal-hal yang berada di luar nalar manusia; (g) *tradition* dan *conformity*, keduanya menekankan pada kepatuhan dan pengendalian diri; (h) *conformity* dan *security*, keduanya mendorong perlindungan terhadap kepentingan dan harmonitas hubungan social; (i) *security* dan *power*, keduanya menekankan pada antisipasi dan menghindari tekanan ketidak pastian dengan cara mengontrol hubungan dan sumber daya.

2. Konflik

Kemudian Schwartz juga menulis bahwa pencapaian simultan beberapa pasang nilai berikut meningkatkan konflik psikologis dan sosial: (a) *self-direction* dan *stimulation* versus *conformity*, *tradition*, dan *security*, menimbulkan konflik antara cara berpikir yang independen dan keinginan untuk berubah dengan sikap patuh dan pengendalian diri, penerimaan terhadap tradisi, dan jaminan stabilitas (b) *universalism* dan *benevolence* versus *achievement* dan *power*, sikap menerima orang lain secara setara dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka akan terganggu oleh usaha untuk mencapai kesuksesan pribadi atau kerabat dan keinginan untuk mendominasi orang lain; (d) *spirituality (universalism)* versus *hedonism*, *power*, dan *achievement*, pencarian makna hidup melalui transendensi realitas sehari-hari akan menjadi kontradiktif dengan usaha untuk mendapatkan timbal balik sensual dan material.

HIPOTESIS

Berdasarkan uraian teori di atas, peneliti mengajukan beberapa hipotesis. (1) Terdapat perbedaan karakteristik nilai antara kelompok pendukung partai. Asumsinya, individu memilih partai tertentu berdasarkan nilai-nilai hidup dalam dirinya. (2) Pendukung partai yang berbasis keagamaan lebih religius dibanding pendukung partai sekular. Tingkat religiusitas ini dapat dilihat dari prioritas nilai universalism di antara nilai-nilai lainnya.

METODE

Sampel

Sebanyak 210 orang direkrut sebagai subjek penelitian, terdiri atas 96 laki-laki dan 105 perempuan. Subjek adalah peserta pemilu 2004, berusia antara 17 sampai dengan 30 tahun.

Instrumen Penelitian

Potrait Values Questionnaire (PVQ). Peneliti menggunakan PVQ versi bahasa Indonesia yang diadaptasi dari PVQ versi bahasa Inggris. Uji reabilitas skala menunjukkan bahwa PVQ cukup reliabel (Cronbach's $\alpha=0,749$). Dalam prosedur penyajiannya, pertama, responden diminta untuk merespon 40 item pernyataan yang merepresentasikan 10 tipe nilai (Schwartz, 1992). Responden memberikan rating pada tiap item berkisar antara skor 6 untuk pernyataan yang "sangat serupa dengan diri saya" dan 1 untuk pernyataan yang "sama sekali tidak serupa dengan diri saya". Untuk mengetahui skor tiap nilai, item-item pada satu kategori nilai dihitung rata-ratanya. Daftar skor 10 tipe nilai dapat dilihat pada

Pilihan partai. Pada lembar kuisioner, dicantumkan pertanyaan tentang pilihan partai responden pada pemilu 2004, satu tahun sebelum survey ini dilakukan. Dari hasil survey, partai-partai pilihan responden adalah PDI Perjuangan ($n=29$), Partai Golkar ($n=33$), Partai Demokrat ($n=73$), dan Partai Keadilan Sejahtera ($n=66$).

Religiosity Self Report. Skala ini terdiri dari satu item dengan mempersilahkan responden memberikan nilai terhadap religiusitasnya dengan menanyakan "Menurut Anda, seberapa religiuskah diri Anda?". Skala berbentuk skala Likert dengan nilai terentang dari angka 0 untuk "tidak religius" sampai angka 7 untuk "sangat religius". Skala ini oleh Schwartz disandingkan dengan PVQ guna memastikan bahwa religiusitas telah tercakup dalam nilai *universalism* dengan melihat hubungan positif keduanya.

Analisis

Analisis diskriminan efektif digunakan untuk mengetahui karakteristik personal pendukung partai politik (Barnea dan Schwartz, 1998; Fife-Schaw dan Breakwell, 1990; Krampen, 2000; Moskowitz dan Stroh, 1996). Menurut Garson (2008), analisis diskriminan dapat digunakan untuk beberapa tujuan sekaligus, antara lain untuk mengklasifikasikan kasus ke dalam kategori-kategori berdasarkan pada persamaan prediksi diskriminan (*discriminant prediction equation*), menguji hipotesis dengan mengobservasi apakah kasus terklasifikasi sebagaimana yang diprediksi, untuk meneliti perbedaan-perbedaan antar kelompok, untuk menentukan cara yang paling cermat untuk menunjukkan perbedaan antar kelompok, untuk menentukan prosentasi varians pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan untuk membuang variabel-variabel yang memiliki kemampuan kecil untuk menunjukkan perbedaan antar kelompok.

Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan nilai universalism. Pada analisis hasil, nilai universalism digunakan untuk membandingkan religiusitas antar pendukung partai. Terakhir, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui prioritas nilai dan diamikanya pada masing-masing pendukung partai.

HASIL DAN DISKUSI

Uji Asumsi

Uji asumsi equalitas data memberikan hasil yang signifikan pada tujuh tipe nilai, yaitu Conformity ($F(3,63) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,05$), Universalism ($F(4,24) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,01$), Stimulation ($F(3,45) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,05$), Hedonism ($F(3,01) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,05$), Achievement ($F(3,94) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,01$), Power ($F(4,93) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,01$), dan Security ($F(3,32) \text{ df1 } 3 \text{ df2 } 195$), $p < 0,05$). Oleh karena itu, analisis karakteristik nilai pendukung partai pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ketujuh tipe nilai tersebut. Selanjutnya, analisis MANOVA secara keseluruhan membuktikan perbedaan karakteristik nilai antar pendukung partai ($F(1,35) \text{ df1 } 135 \text{ df2 } 32308,6$), $p < 0,01$). Analisis fungsi diskriminan menunjukkan kolom fungsi 1 signifikan ($\lambda = 0,779$; $p < 0,01$). Fungsi 1 mampu menghitung perbedaan-perbedaan nilai di antara pendukung partai sebesar 61,9%.

Tabel 3.
Fungsi Diskriminan Pendukung Partai Berdasarkan Prioritas Nilai

Tipe Nilai	Fungsi 1
Hedonism	0,373
Universalism	0,361
Achievement	0,328
Security	0,303
Conformity	0,281
Power	0,177
Stimulation	0,047
Eigen values	0,164
Canonical Correlation	0,376
Relative Percent Variance	61,9
Sig.	0,008
Wilk's λ	0,779
Chi-square	47,809
Df	27

Karakteristik Nilai Pendukung Partai

Tabel 3 menunjukkan koefisiensi diskriminan tiap tipe nilai terhadap kelompok politik. Dengan menggunakan standar koefisiensi diskriminan minimum sebesar 30% (Barnea dan Schwartz, 1998) dapat disimpulkan dari tujuh tipe nilai yang digunakan dalam penelitian ini, empat tipe nilai diantaranya yaitu Hedonism, Universalism, Achievement, dan Security terbukti relevan dalam menjelaskan perbedaan pilihan partai oleh responden. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan karakteristik nilai antar kelompok pendukung partai (Hipotesis 1) dapat diterima.

Kemudian, koefisien diskriminan nilai yang secara keseluruhan bernilai positif menunjukkan tidak adanya konflik antar nilai. Hal ini berbeda dengan struktur nilai yang diajukan Schwartz (Barnea dan Schwartz, 1998; Schwartz, 1992). Menurut Schwartz, pencapaian nilai universalism akan berlawanan dengan pencapaian *achievement*. Namun sebaliknya, dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa pencapaian nilai *Universalism* (36,1%) dan *Achievement* (32,8%) berlangsung simultan. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Di negara-negara Barat, pengakuan terhadap prestasi seseorang bersifat individualistik. Individu diakui berdasarkan ambisi-ambisi pribadi yang berhasil dicapai. Pencapaian ambisi

pribadi semacam ini tentu akan kerap berbenturan dengan nilai *universalism* seperti perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, kepedulian sosial, dan pemaknaan hidup. Hal ini berbeda dengan budaya kolektif seperti di Indonesia. Pengakuan sosial berkaitan erat dengan seberapa besar kegunaan individu pada lingkungan sosialnya. Walaupun individu berhasil mendapatkan ambisi pribadi, namun belum tentu mendapatkan pengakuan sosial bila keberhasilan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pencapaian *achievement* di Indonesia harus simultan dengan nilai *universalism*.

Menarik untuk diketahui bahwa nilai *power* tidak relevan dengan dukungan terhadap partai politik. *Power* merupakan dorongan untuk mendapatkan status terhormat, kontrol, dan dominasi terhadap orang lain. Politik merupakan sarana menuju kekuasaan. Akan tetapi hal ini tidak relevan bagi responden yang tidak menduduki posisi struktural apapun di partai. Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa dukungan individu terhadap partai lebih didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keinginan tersebut meliputi kesenangan hidup (*hedonism*), keharmonisan sosial dan alam semesta (*universalism*), prestasi sosial (*achievement*), dan rasa aman dan terlindungi (*security*).

Disadari atau tidak oleh masyarakat umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *hedonism* dan *achievement* merupakan nilai-nilai tendensi kuat yang melatar belakangi pilihan politik individu. Dalam struktur nilai Schwartz, kedua nilai ini merupakan representasi nilai-nilai *self interest* (tipe nilai *Self Enhancement*). Nilai-nilai *self interest* cenderung mengutamakan kepentingan diri di atas kepentingan orang banyak. Menurut Southworth dan Van Slyke (2001), satu diantara tiga tipe korupsi didorong oleh nilai *self interest* yang terlalu besar. Demi kepentingan diri, individu akan mencari argument-argumen yang mendukung perilaku pelanggaran hukum. Dengan karakteristik nilai yang didominasi oleh dorongan *self enhancement*, pendukung partai rawan terjerat politik uang (*money politic*). Dukungan terhadap partai dilandasi oleh keuntungan material hedonis yang diberikan oleh partai politik kepada individu.

Setelah relevansi nilai terhadap dukungan partai terbukti, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik nilai pendukung tiap partai. Prioritas nilai dapat diinterpretasi dengan membandingkan Z Score masing-masing tipe nilai.

1. Prioritas nilai pendukung Partai Golkar

Tabel 4.

Prioritas Nilai Kelompok Pendukung Partai Golkar

No	GOLKAR	
	Tipe nilai	Z Score
1	Hedonism	0,7563
2	Security	0,442
3	Achievement	0,3583
4	Universalism	0,2189

Pada Tabel 4, diketahui bahwa dorongan utama responden memilih partai adalah nilai *hedonism*. Dengan memilih partai, responden berharap akan mendapatkan kesenangan-kesenangan atau kenikmatan-kenikmatan hidup. Prioritas kedua pendukung Partai Golkar adalah terpenuhinya rasa aman dan terlindungi. Nilai *Security* berkaitan erat dengan kebutuhan akan stabilitas sosial. Dalam kategori tipe nilai yang lebih tinggi (lihat Gambar 1), *security* merupakan representasi nilai konservatif. Nilai ini mendorong individu untuk menghindari perubahan. Individu cenderung mempertahankan *status quo*. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai *security* simultan dengan nilai *hedonism*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pencapaian kebutuhan hedonis pendukung Partai Golkar dilakukan dengan mempertahankan kestabilan.

2. Prioritas nilai pendukung PDI Perjuangan

Tabel 5.

Prioritas Nilai Kelompok Pendukung PDI Perjuangan

No	PDI PERJUANGAN	
	Tipe nilai	Z Score
1	Hedonism	0,0109
2	Security	-0,2917
3	Achievement	-0,4677
4	Universalism	-0,5193

Tabel 5 menunjukkan bahwa urutan prioritas nilai pendukung PDIP sama dengan pendukung Partai Golkar meski dengan skor-skor yang lebih rendah. Artinya, dinamika nilai

pendukung PDI Perjuangan sama dengan dinamika nilai pada pendukung Partai Golkar akan tetapi dengan dorongan yang lebih rendah. Dengan kemiripan karakteristik nilai antara kedua pendukung partai ini, maka koalisi antara kedua partai ini tidak akan menimbulkan gejolak pada kelompok pendukung masing-masing.

3. Prioritas nilai pendukung Partai Demokrat

Tabel 6.

Prioritas Nilai Kelompok Pendukung Partai Demokrat

No	DEMOKRAT	
	Tipe nilai	Z Score
1	Hedonism	0,5384
2	Achievement	0,0832
3	Security	0,0798
4	Universalism	-0,0046

Tabel 6 menunjukkan bahwa *hedonism* juga menjadi prioritas utama bagi pendukung Partai Demokrat. Bahkan, dorongan ini diperkuat dengan kebutuhan untuk mencapai prestasi pribadi (*achievement*) pada prioritas kedua. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dorongan *self enhancement* pendukung Partai Demokrat relatif tinggi sebab tidak terhambat oleh nilai *security* dan *universalism*. Konsekuensinya, situasi di dalam kelompok pendukung Partai Demokrat sangat kompetitif. Persaingan antar individu cukup menonjol. Oleh karena itu, individu-individu pendukung Partai Demokrat cenderung progresif. Nilai *self interest* yang tinggi juga menciptakan pola hubungan yang cenderung individualistik. Konsekuensi negatifnya, pendukung Partai Demokrat rawan terhadap konflik kepentingan personal antar individu.

4. Prioritas nilai pendukung PKS

Tabel 7.

Prioritas Nilai Kelompok Pendukung PKS

PKS	
Tipe nilai	Z Score
Hedonism	0,4857
Universalism	0,1961
Achievement	0,1171
Security	0,1129

Tabel 7 menunjukkan prioritas nilai pendukung PKS. Prioritas nilai utama pendukung PKS adalah hedonism, sama dengan partai-partai sekuler lainnya. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa partai yang berideologi agama lebih memprioritaskan *self transcendent* sementara partai sekular memprioritaskan *self enhancement* (Hipotesis 2) tidak diterima. Meski demikian, corak PKS sebagai partai agama tetap tampak pada nilai universalism yang menduduki prioritas kedua. Universalism merupakan representasi nilai religiusitas. Analisis korelasi Pearson dua arah antara tingkat religiusitas dan nilai universalism menunjukkan hubungan positif yang signifikan ($p < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa PKS lebih religius dibanding partai-partai sekular. Seperti diutarakan sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe nilai hedonism simultan dengan nilai universalism. Berdasarkan karakteristik nilai pada Tabel 7, dapat diinterpretasi bahwa pencapaian kebutuhan hedonism pendukung PKS didukung oleh nilai-nilai religiusitas mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai berperan saat individu memutuskan partai apa yang akan didukung. Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, individu akan melakukan evaluasi terhadap partai politik sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang (Barnea dan Schwartz, 1998; Freire dan Lobo, 2005; Young, dkk., 1987). Namun, sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia menyebabkan tiap-tiap partai tidak memiliki karakteristik yang secara jelas dapat dibedakan oleh masyarakat. Padahal, karakteristik partai yang spesifik diperlukan untuk memudahkan individu

menyamakan karakteristik partai dengan nilai-nilai personal. Seperti yang telah ditunjukkan dalam penelitian ini, terdapat kemiripan karakteristik nilai antara pendukung Partai Golkar dan PDIP. Sebab, faktanya tidak ada karakteristik menonjol yang membedakan kedua partai ini. Keduanya sama-sama konservatif sehingga diminati oleh individu-individu yang cenderung pro *status quo*.

Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS sebagai partai baru, masing-masing memiliki pendukung dengan karakteristik nilai yang spesifik. Partai baru merupakan alternatif yang banyak dipilih oleh individu-individu yang mengalami penurunan kepercayaan terhadap partai-partai lama (Bélanger dan Nadeu, 2005). Individu-individu ini kemudian mencari partai baru yang lebih sesuai dengan nilai personalnya. Oleh sebab itu, logis bila individu-individu pendukung PKS dan Partai Demokrat memiliki karakteristik yang spesifik. PKS yang mengusung ideologi agama berhasil menarik pendukung yang religius sementara Partai Demokrat yang sekuler diminati oleh individu-individu progresif.

Namun secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pendukung semua partai didominasi oleh nilai hedonism. Apabila partai yang didukung berhasil mempengaruhi kebijakan publik, mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hedonis yang mencakup pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan fisik. Situasi ini menyebabkan partisipasi politik di Indonesia rawan terhadap intervensi politik uang. Bila hal ini tetap dibiarkan, maka akan mengancam proses demokrasi yang sehat. Sebab, proses politik yang dilandasi oleh nilai hedonis hanya akan didominasi oleh partai yang memiliki kekuatan finansial yang paling besar, bukan partai yang secara rasional paling terpercaya untuk mengelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acevendo, Melissa dan Krueger, Joachim I. 2004. Two Egocentric Sources of the Decision to Vote: The Voter's Illusion and the Belief in Personal Relevance. *Political Psychology*, Vol. 25, No. 1 (Feb., 2004), pp. 115-134
- Barnea, Marina F. dan Schwartz, Shalom H. 1998. Values and Voting. *Political Psychology*, Vol. 19, No. 1 (Mar., 1998), pp. 17-40
- Bélanger, Éric dan Nadeau, Richard. 2005. Political Trust And The Vote In Multiparty Elections: The Canadian Case. *European Journal of Political Research* 44: 121-146, 2005

- Burkley, M. dan Blanton, H. 2005. When Am I My Group? Self-Enhancement Versus Self-Justification Accounts of Perceived Prototypicality. *Social Justice Research, Vol. 18, No. 4, December 2005*
- Chrobot-Mason, D., Ruderman, M., Weber, T., Ohlott, P.J., Dalton, M.A. 2007. Illuminating A Cross-Cultural Leadership Challenge: When Identity Groups Collide. *The International Journal of Human Resource Management 18:11 November 2007 2011–2036*
- Dekker, Sonja dan Fischer, Ronald. 2008. Cultural Differences in Academic Motivation Goals: A Meta-Analysis Across 13 Societies. *The Journal of Educational Research, November/December 2008 [Vol. 102(No. 2)]*
- Fieldman, Ofer. 1990. Political Psychology in Japan. *Political Psychology, Vol. 11, No. 4 (Dec., 1990), pp. 787-804*
- Fife-Schaw, Chris dan Breakwell, Glynis M. 1990. Predicting the Intention Not to Vote in Late Teenage: A U.K. Study of 17- and 18-Year-Olds. *Political Psychology, Vol. 11, No. 4 (Dec., 1990), pp. 739-755*
- Freire, André dan Lobo, Marina Costa. 2005. Economics, ideology, and vote: Southern Europe, 1985–2000. *European Journal of Political Research 44: 493–518, 2005*
- Gari, A., Kostas, M., dan Karagianni, D. 2005. Political and Religious Group Membership, Value Priorities and Educational Values. *Journal of Beliefs & Values, Vol. 26, No. 3, December 2005, pp. 301–310*
- Garson, David G. 2008. *Discriminant Analysis*.
<http://faculty.chass.edu/Garson?PA765.discrim.htm>
- Gupta, Dipak K. dan Singh, Harinder. 1992. An Expected Utility Approach of Behavioral Motivations. *Political Psychology, Vol. 13, No. 3 (Sep., 1992), pp. 379-406*
- Hurwitz, Jon. 1984. Social Stereotyping and the Concept of Party Identification. *Political Psychology, Vol. 5, No. 4 (Dec., 1984), pp. 707-736*
- Knack, Stephen dan Kropf, Martha E. 1998. For Shame! The Effect of Community Cooperative Context on the Probability of Voting. *Political Psychology, Vol. 19, No. 3, Special Issue: Psychological Approaches to Social Capital (Sep., 1998), pp. 585-599*
- Koivula, Nina dan Verkasalo, Markku. 2006. Value Structure Among Students and Steelworkers. *Journal of Applied Social Psychology, 2006, 36, 5, pp. 1263–1273*
- Krampen, Gunter. 2000. Transition of Adolescent Political Action Orientations to Voting Behavior in Early Adulthood in View of a Social-Cognitive Action Theory Model of Personality. *Political Psychology, Vol. 21, No. 2 (Jun., 2000), pp. 277-297*

- Matthews, B., Lietz, P., dan Darmawan, I.G. 2007. Values and Learning Approaches of Students at an International University. *Social Psychology of Education* (2007) 10:247–275
- Moskowitz, D. dan Stroh, P. 1996. Expectation-Driven Assessments of Political Candidates. *Political Psychology*, Vol. 17, No. 4 (Dec., 1996), pp. 695-712
- Ohtsubo, Yohsuke dan Watanabe, Yoriko. 2003. Contrast Effects and Approval Voting: An Illustration of a Systematic Violation of the Independence of Irrelevant Alternatives Condition. *Political Psychology*, Vol. 24, No. 3 (Sep., 2003), pp. 549-559
- Redlawsk, David P. 2003. What Voters Do: Information Search during Election Campaigns. *Political Psychology*, Vol. 25, No. 4, *Symposium on Campaigns and Elections* (Aug., 2004), pp. 595-610
- Schwartz, Shalom H. 1992. Universals in the Content and Structure of Values : Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In M. Zanna (Ed.) (1992). *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 25), pp. 1-65
- Simon, Herbert. 1995. Rationality in Political Behavior. *Political Psychology*, Vol. 16, No. 1, *Special Issue: Political Economy and Political Psychology* (Mar., 1995), pp. 45-61
- Southworth, Dixon E. dan Van Slyke, David M. 2001. A Vision For The Next Centurygovernment Without Corruption. *For presentation at the annual conference of the American Society for Public Administration, Newark, NJ, March 13, 2001 and Online ASPA Conference March, 2001*
- Uhlaner, Carol Jean. 1986. Political Participation, Rational Actors, and Rationality: A New Approach. *Political Psychology*, Vol. 7, No. 3 (Sep., 1986), pp. 551-573
- Wiegele, Thomas C. dan Oots, Kent Layne. 1990. Type A Behavior and Local Government Elites. *Political Psychology*, Vol. 11, No. 4 (Dec., 1990), pp. 721-737
- Young, J., Borgida, E., Sullivan, J., dan Aldrich, J. dkk., 1987 VB 03. Personal Agendas and the Relationship Between Self-Interest and Voting Behavior. *Social Psychology Quarterly*, Vol. 50, No. 1 (Mar., 1987), pp. 64-71